

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andora, Hengki, 2021, *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dialektika dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2007, *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Ismail, Nurhasan, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, HuMa dan Magister Hukum UGM, Jakarta.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1994, *Analisis Data Kualitatif*, Publikasi Sage, California.

Pemerintah Desa Gudang Batu, 2019, *RPJM Desa Gudang Batu 2019-2024*, Gudang Batu.

_____, 2024, *Profil Desa Gudang Batu*, Gudang Batu.

Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.10, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Press, Depok.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah/Jurnal

Bahari, Syaiful, dkk., 2025, "Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945," *JUSTLAW: Jurnal Sains dan Teori Hukum*, 2, no. 1, 2025.

Hukumonline, 2019, "Pengelolaan Barang Milik Negara dari Hulu Minyak dan Gas Bumi Diubah," *Indonesian Law Digest (ILD)*, no. 617, 12 Juli 2019.

Pratama, M. Rafli, dan Maylanny Christin, 2024, "Strategi Negosiasi pada Proses Pembebasan Lahan oleh Land Matters & Formalities (LMF) PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS)," *e-Proceeding of Management*, 11, no. 3, Juni 2024.

Sembiring, Julius, 2016, "Hak Menguasa Negara atas Sumber Daya Agraria," *Bhumi*, 2, no. 1, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 /PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1840 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Syarat dan Ketentuan) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja pada Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode I Tahun 2008.

Keputusan Menteri ESDM Nomor: 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional.

